



**ANALISIS INTEGRASI WILAYAH
SECARA EKONOMI DAN SPACIAL
DI KOTA KEDIRI DAN KABUPATEN KEDIRI**

***THE ECONOMICAL AND SPATIAL REGIONAL
INTEGRATION ANALYSIS
IN CITY AND REGENCY KEDIRI***

TESIS

**Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Magister Sains (M.Si)
pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember**

**OLEH :
NINING PURNAMANINGSIH
NIM : 080820201018**

**MAGISTER ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER**

2010
LEMBAR PERSETUJUAN

**Judul Tesis : Analisis Integrasi Wilayah Secara Ekonomi Dan Spacial Di
Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri Tahun 1999 – 2008 “**
Nama : Dra. Nining Purnamaningsih, MM.
NIM : 080820201018
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Daerah
Tanggal Persetujuan : 22 Juni 2010

Oleh:
Pembimbing Utama

Dr. RAFAEL PURTOMO SOMAJI, M.Si.
NIP. 19581024 198803 1 001

Pembimbing Anggota

Drs. SUNLIP WIBISONO, M.Kes
NIP. 19581206 198603 1 003

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dr. RAFAEL PURTOMO SOMAJI, M.Si.
NIP. 19581024 198803 1 001

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Tesis : Analisis Integrasi Wilayah Secara Ekonomi
Dan Spacial Di Kota Kediri Dan Kabupaten
Kediri Tahun 1999 – 2008
Hari/ Tanggal : Selasa, 29 Juni 2010
Tempat : Pascasarjana Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Prof. Dr. H. Sarwedi, MM
NIP.19531015 198303 1 001

Anggota I,

Anggota II,

Dr. Rafael Purtomo S., M.Si.
NIP. 19581024 198803 1 001

Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes
NIP. 19581206 198603 1 003

Dekan
Fakultas Ekonomi

Prof. Dr. H. M. Saleh, M.Sc

NIP. 19560831 198403 1 002

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan kepada :

- **Ibunda tercinta Siti Mariyam Barnoto**
- **Suamiku tercinta Karsono Rahadi**
- **Putraku tersayang Puradian Wiryadigda dan Enfanta Pamungkas**
- **Teman-temanku Fakultas Ekonomi Universitas Kadiri Kediri**
- **Almamater Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas
Jember**

MOTTO

*THE FUTURE BECOMES THE PRESENT,
THE PRESENT BECOMES THE PAST.
THE PAST BECOMES ETERNAL REGRET.
IF YOU DON'T PLANT FOR IT.*

(TENESSE WILLIAM)

*Ditengah kesulitan yang menghimpit, dipastikan
ada peluang yang menawarkan*

(Albert Einstein)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Nining Purnamaningsih,MM.

NIM : 080820201018

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “*Analisis Integrasi Wilayah Secara Ekonomi Dan Spacial Di Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri Tahun 1999 – 2008* “ adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademis jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember , 22 Juni 2010
Yang Menyatakan,

NINING PURNAMANINGSIH
NIM 080820201018

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nyalah tesis dengan judul : *Analisis Integrasi Wilayah Secara Ekonomi Dan Spacial Di Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri Tahun 1999 – 2008* “ dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini perkenankan penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Jember atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan dalam mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Jember;
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember Prof. Dr. H. M. Saleh, M.Sc. atas kesempatan yang diberikan untuk menjadi mahasiswa pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Jember;
3. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi Bapak Dr. Rafael Purtomo S., M.Si. atas kesempatan dan motivasi yang telah diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ilmu Ekonomi Program Pascasarjana Universitas Jember;
4. Dosen pembimbing utama Bapak Dr. Rafael Purtomo S., M.Si. dan Dosen pembimbing anggota Bapak Drs. Sunlip Wibisono, M.Kes. atas semua ketulusan dan motivasi dalam membimbing penulisan tesis ini;
5. Bapak dan Ibu dosen di Pascasarjana Universitas Jember yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis;
6. Rektor Universitas Kadiri yang telah memberikan izin untuk tugas belajar.
7. Kedua orang tuaku, suami dan dua putraku, serta saudara-saudaraku yang telah memberikan dorongan dan doanya demi terselesaikannya tesis ini

8. Sahabat-sahabatku Magister Ilmu Ekonomi yang telah banyak membantu selama penulis menyusun tesis ini dan memberi dorongan/semangat.
9. Semua pihak yang tak dapat disebutkan satu per satu.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini. Akhirnya penulis berharap, semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jember, Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Penelitian ini berjudul *Analisis Integrasi Wilayah Secara Ekonomi Dan Spacial Di Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri Tahun 1999 – 2008* “ , bertujuan untuk mengetahui peranan Kota Kediri sebagai pusat pertumbuhan terhadap daerah-daerah hinterlandnya dan hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi di Kota terhadap Kabupaten Kediri serta untuk mengetahui hubungan integrasi ekonomi antara Kota Kediri dan Kabupaten.Kediri.

Jenis penelitian yang dilakukan penelitian diskriptif dan pengambilan sample dengan menggunakan Purposive Random Sampling: pengambilan sample secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini terkait dengan Kabupaten Kediri meliputi 23 Kecamatan (diambil 4 Kecamatan yang merupakan hinterland). Sedang Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan diambil semua.

Metode analisis yang digunakan adalah Analisa Shift Share, Kausalitas Granger, Analisa Gravitasi. Hasil Analisis menunjukkan bahwa pergeseran total pertumbuhan ekonomi antar wilayah di Kabupaten dan Kota Kediri yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional dan persentase perubahan PDRB dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah menunjukkan bahwa Kota Kediri (lambat) – Kabupaten Kediri (maju) – Gabungan Kota dan Kabupaten Kediri (maju). Dari analisa regresi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung serta melalui lag waktu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kota. Tetapi pertumbuhan ekonomi Kota tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sehingga dapat disimpulkan bahwa antara pertumbuhan ekonomi secara tidak langsung serta setelah sekian periode lag akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten.

Dalam analisis Gravitasi hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga terjadi saling mempengaruhi (interaksi) antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik antar daerah. Pusat pertumbuhan kota Kediri mempunyai daya tarik yang kuat terhadap daerah belakangnya terutama bagi daerah yang mempunyai jarak cukup dekat dengan pusat pertumbuhan. Adapun untuk nilai yang terbentuk pertahunnya pada setiap wilayah hinterland cenderung mengalami peningkatan secara terus menerus. Daerah *hinterland* di kota Kediri yang mempunyai interaksi (daya tarik) yang paling kuat dengan pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Wates dengan nilai indeks gravitasi tertinggi sebesar 896,296,135.90 yang terjadi pada tahun 2008, sedangkan daerah yang mempunyai interaksi terendah terhadap pusat pertumbuhan adalah Kecamatan Grogol dengan nilai indeks gravitasi sebesar 38,003,080.56 yang terjadi pada tahun 2004.

Kata Kunci: Integrasi Wilayah, Pusat Pertumbuhan , Wilayah Hinterland.

ABSTRACT

This Research entitled 'The Economical and Spatial Regional Integration Analysis in City and Regency Kediri from 1999 to 2008' aims to know the role of Town Kediri as growth center to area of it's hinterland and the relation of economic growth in the City Kediri and Regency Kediri and also to know the economic integration between both City and Regency Kediri.

The conducted research type is a descriptive research. Taking up the sample using Purposive Random Sampling is intended with the certain consideration. It is the matter related with the Regency Kediri covering 23 Sub-districts taken by 4 Sub-districts representing hinterland place; and the City Kediri consists of 3 sub-districts taken all.

The used analysis methods are Analyses of Shift Share, Causality Granger, and Gravitation. The results of analysis indicate that the total friction of economic growth among the regions in Regency and City Kediri caused by the growth proportional component; and percentage of change of GDRP and the regional compartment growth component indicates tardy for the City Kediri; and it is going forward for Regency Kediri. Merger of both City and Regency Kediri is going forward. The Regress Analysis indicates that the economic growth indirectly and also passing lag time that will influence the economic growth of the City. But economic growth of the City does not influence the economic growth of inferential Regency so that it can be said between economic growths indirectly and after lag period will influence the economic growth of the Regency.

The resut of Analysis Gravitation among the areas indicates that there is an equal relation among the region mass having fascination, so that it happens mutual interactions of each other (interregional interacts) as an interesting strength materialization draw interregional. The growth center of City Kediri has strong fascination to its neighbor area especially for area having distance close enough to growth center. The value formed annually in each region hinterland tends to improve continually. Area Hinterland in City Kediri having strongest interest with the growth center is Sub-district Wates with highest gravitation index equal to 896,296,135.90 that happened in the year 2008, while area having the lowest interaction to growth center is Sub-district Grogol with index gravitation equal to 38,003,080.56 that happened in the year 2004

Keywords: Regional Integration, Growth Center, and Hinterland

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	10
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Teori	11
2.1.1 Pembangunan Eekonomi	11
2.1.2 Pengertian Wilayah	13
2.1.3 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah	16
2.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi	25
2.1.5 Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah	35
2.1.6 Teori Lokasi dan Analisa Ekonomi Spasial	35
2.1.7 Analisa Wilayah Pelayanan	36
2.1.8 Kebijakan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal	38

2.1.9 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah	39
2.2 Penelitian Sebelumnya	41
2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	45
BAB 3 METODE PENELITIAN	47
3.1 Rancangan Penelitian	47
3.1.1 Lokasi Penelitian	47
3.1.2 Jenis Penelitian	47
3.1.3 Populasi dan Sampel Penelitian	47
3.2 Jenis dan Sumber Data	48
3.3 Metode Pengumpulan Data	49
3.4 Metode Analisa Data	49
3.4.1 Analisis Shift Share	49
3.4.2 Analisis Kausalitas Grenjer	51
3.4.3 Analisis Gravitasi	53
BAB 4 HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Kondisi Wilayah	54
4.1.1 Profil Kota Kediri	54
4.1.2 Profil Kabupaten Kediri	61
4.2 Analisis Data	68
4.2.1 Peran Pusat Pertumbuhan Kota Kediri Terhadap Hinterland.....	68
4.2.2 Hasil Analisis Hubungan Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi Wilayah Kota dan Hinterlandnya	70
4.2.3 Hasil Analisis Gravitasi.....	72
4.3 Pembahasan	74
BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN	78
5.1 Kesimpulan	78
5.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN – LAMPIRAN	85

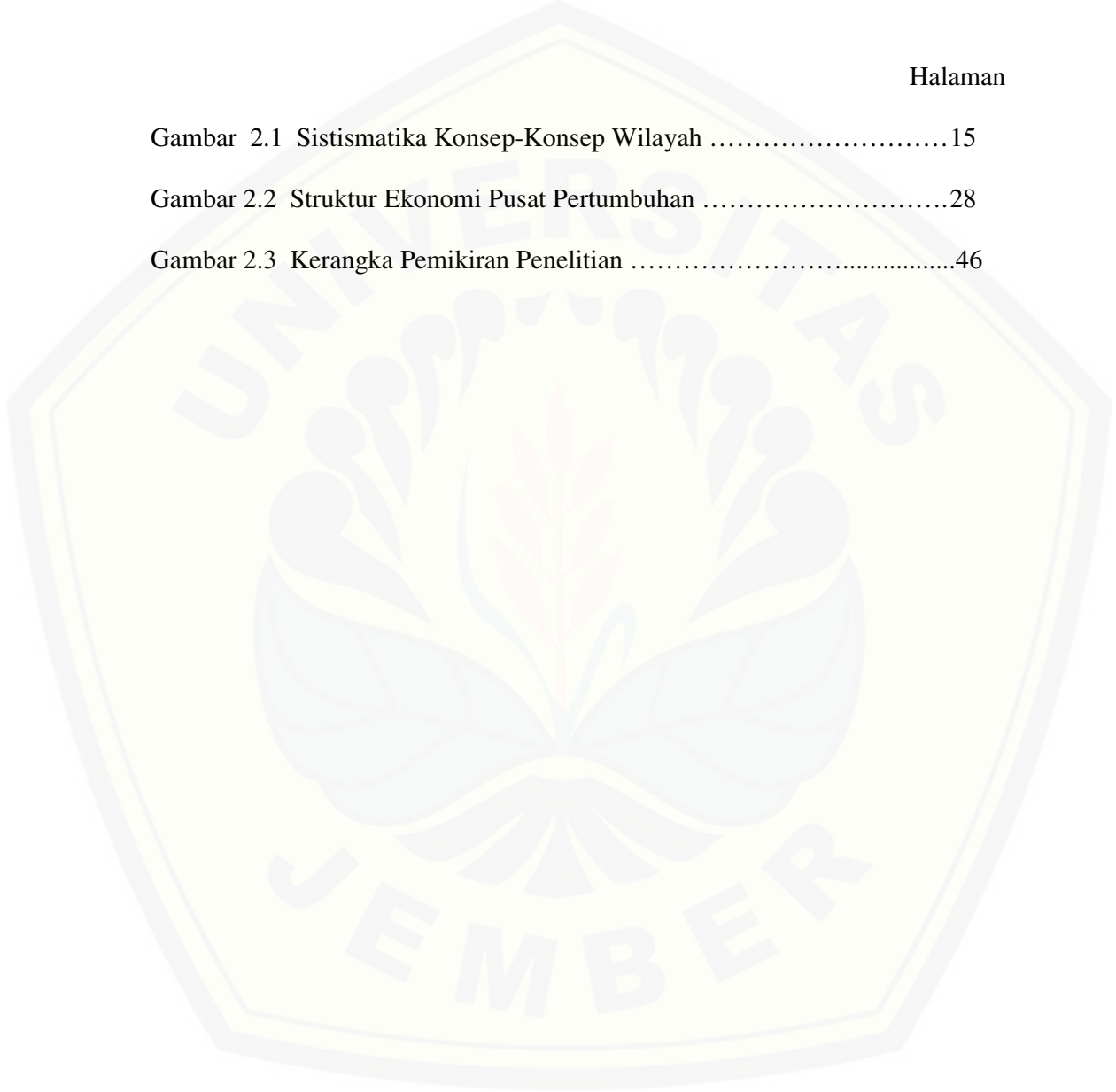
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah.....	35
Tabel 4.1 Indikator Demografis Kota Kediri 1999-2008	55
Tabel 4.2. Banyaknya Pencari Kerja, Penempatan dan permintaan, Di Kota	56
Tabel 4.3. Besarnya Kebutuhan Hidup Layak (KHL) Dan Upah Minimum Regional (UMR) Di Kota Kediri , Tahun 2005 – 2008	58
Tabel 4.4. Banyaknya Sarana Pendidikan Di Kota Kediri Tahun 2004 – 2008	59
Tabel 4.5 Indikator Ekonomi Kota Kediri 2004-2008	60
Tabel 4.6. Jumlah Penduduk per Kecamatan Tahun 2004 - 2008 di Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur	64
Tabel 4.7. Komposisi Tenaga Kerja Menurut umur dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kediri Tahun 2000	65
Tabel 4.8. Jumlah Pengusaha Industri Pengolahan Menurut Jenis Industri di Kabupaten Kediri, 2004 – 2008.....	66
Tabel 4.9. PDRB Kota dan Kabupaten Kediri Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2000 – 2008	68
Tabel 4.10 Hasil Perhitungan Pergeseran Total Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri Terhadap wilayah Kabupaten Kediri Tahun 1999-2008	69
Tabel 4.11 Perhitungan Analisis Indeks Gravitasi di Kota dan	

Kawasan Hinterlandnya Tahun 2004-2008 73

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sistematika Konsep-Konsep Wilayah	15
Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan	28
Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian	46



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran A:	
Lampiran 1. PDRB Kota Kediri Atas Dasar Harga Konstan 1999– 2008 (Juta Rupiah).....	84
Lampiran 2. Struktur Perekonomian Kota Kediri Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1999 – 2008 (Juta Rupiah).....	85
Lampiran 3. PDRB Kota Kediri Atas Dasar Harga Konstan 1999– 2008 (Dalam Persen).....	86
Lampiran 4. Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kota Kediri.....	87
Lampiran 5. Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kota Kediri menurut ADHK Tahun 1999 – 2008.....	88
Lampiran 6. PDRB Kabupaten Kediri Atas Dasar Harga Konstan 1999– 2008 (Juta Rupiah).....	89
Lampiran 7. Struktur Perekonomian Kabupaten Kediri Berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 1999 – 2008 (Juta Rupiah).....	90
Lampiran 8. PDRB Kabupaten Kediri Atas Dasar Harga Konstan 1999– 2008 (Dalam Persen).....	91
Lampiran 9. Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan PDRB Perkapita Kabupaten Kediri.....	92
Lampiran 10. Jumlah Penduduk dan PDRB Perkapita Kabupaten Kediri menurut ADHK Tahun 1999 – 2008.....	93
Lampiran B :	
Lampiran 1. Hasil Regresi Kausalitas Granger Pertumbuhan Ekonomi	

Kota dan Kabupaten Kediri94



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Penataan ruang pedesaan di Jawa Timur pada dasarnya tidak dapat lepas dari kenyataan masih adanya pola perkembangan wilayah inti dan wilayah pinggiran. Kawasan pinggiran merupakan wilayah yang mengelilingi daerah inti yang secara umum merupakan daerah perkotaan. Daerah pinggiran merupakan penopang produksi Sumber Daya Alam (SDA) bagi wilayah inti atau sebagai wilayah hinterland. Wilayah pinggiran atau wilayah hinterland tersebut secara umum merupakan wilayah pedesaan.

Kawasan pedesaan secara umum mempunyai ciri sebagai wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

Penataan struktur ruang pedesaan juga melihat kenyataan bahwa wilayah pedesaan selalu tertinggal oleh perkembangan perkotaan. Wilayah perkotaan sebagai wilayah inti kurang dapat memberikan efek menetes bagi perkembangan wilayah pedesaan. Keterkaitan desa - kota sering terjadi dalam pola kecenderungan aliran sumberdaya dari wilayah pedesaan ke kawasan perkotaan secara besar-besaran dengan disertai derasnya proses (*speed up processes*) migrasi penduduk secara berlebihan dari wilayah pedesaan ke kawasan kota-kota besar

Keterkaitan pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang dan tidak mutualis, menghasilkan kemiskinan di pedesaan, sehingga pendekatan pembangunan selama ini yang banyak mengakibatkan konsentrasi ke perkotaan

harus menjadi perhatian semua pihak. Apabila proses urbanisasi tidak terkendali, maka akan semakin mendesak produktifitas pertanian dibiarkan akan mengancam ketahanan pangan regional bahkan nasional.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional disebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi. Pusat Kegiatan Wilayah adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Sedang Pusat Kegiatan Lokal adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan. Untuk pusat kegiatan tersebut dapat berupa : kawasan megapolitan; kawasan metropolitan; kawasan perkotaan besar; kawasan perkotaan sedang; kawasan perkotaan kecil. Hal ini dapat ditetapkan dengan kriteria : kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan; dan/atau kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Wilayah Kediri termasuk Kawasan Perkotaan sedang.

Pengembangan kawasan agropolitan berdasarkan fakta tersebut, merupakan alternatif pembangunan perdesaan melalui *urban-rural linkages* untuk mencegah terjadinya urban bias. Namun demikian keterkaitan desa-kota masih tetap diarahkan karena secara umum dalam pola kawasan pedesaan sebagai wilayah pertanian yang mempunyai hubungan dengan perkotaan yang kuat.

Hubungan antara pertumbuhan kota dan wilayah belakangnya (hinterland) dalam kaitannya dengan sektor pertanian, secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut :

Kota merupakan pasar bagi hasil-hasil pertanian dan pusat perdagangan dengan sektor pertanian, secara ringkas dapat dikemukakan sebagai berikut: komoditi pertanian (Rencana Wilayah Jawa Timur, 2005: 3) yaitu (1) Pertumbuhan penduduk perkotaan dan aglomerasi menyebabkan peningkatan permintaan terhadap hasil-hasil pertanian wilayah sekitarnya; (2) Pasar hasil-hasil pertanian di kota-kota memberikan kesempatan kerja bagi penduduk kota, baik di bidang perdagangan maupun jasa; (3) Fungsi kota, terutama kota-kota sedang dan kecil, adalah sebagai pemasok kebutuhan dan lokasi pengolahan agroindustri dan berbagai kegiatan agrobisnis; (4) Pertumbuhan kota mempengaruhi pola usaha tani, intensitas penggunaan lahan, pola komoditi dan investasi di sektor pertanian di sekitar kota; (5) Kota sebagai pusat pelayanan, pusat prasarana dan sarana sosial ekonomi mempengaruhi pedesaan dalam peningkatan produktifitasnya.

Karena kota merupakan pusat kegiatan ekonomi wilayah dan pusat pelayanan input pertanian, bank, tenaga ahli, transportasi, penyimpanan dan pergudangan, pengolahan, perbengkelan, dan sebagainya maka hubungan timbal balik antara kota dan wilayah belakangnya menentukan perkembangan suatu wilayah.

Kota Kediri adalah sebuah kota di Jawa Timur yang berbasis industri khususnya rokok (gudang Garam) dan perdagangan. Secara teori basis industri rokok tersebut peranannya sangat besar dilihat dari kemampuan multipliyer nilai

tambah, kesempatan kerja, out put hingga ke pendapatan. Sebaliknya Kabupaten Kediri merupakan kabupaten yang berbasis pertanian dan termasuk wilayah yang potensinya luar biasa. Secara teoritis hubungan kedua wilayah bisa bersifat fungsional sehingga merupakan satu kesatuan fungsi baik ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga diduga kedua wilayah ada pola integrasi yang khusus. Seperti diketahui bahwa fungsi kawasan adalah sebagai Pusat Pelayanan Sekunder jasa pemerintahan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian, perkebunan dan pariwisata alam. Arahan pengelolaan kawasan meliputi:

- a. Sebagai pusat pertumbuhan wilayah propinsi yang mendukung perkembangan sektor pertanian pangan dan hortikultura.
- b. Mengendalikan dan merelokasi secara bertahap lokasi kegiatan industri pada kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan.
- c. Mengendalikan konversi kawasan pertanian beririgasi teknis menjadi kawasan permukiman dan perkotaan.
- d. Tetap mempertahankan kawasan pertanian beririgasi teknis sebagai lumbung pangan nasional.
- e. Mengendalikan pertumbuhan kota secara ekspansif yang tidak terkendali dan pertumbuhan terus-menerus melalui pengembangan jalur hijau yang membatasi fisik kota.
- f. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan utilitas kota (jalan, persampahan, air bersih, drainage) sesuai standar nasional.
- g. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang menjamin kesejahteraan dan kreativitas masyarakat kota.

Berdasarkan pemikiran ini maka konsep pembangunan dengan melalui pewilayahan pembangunan dimana setiap satuan wilayah hinterland diintegrasikan dalam satu kesatuan dengan satu kutub pertumbuhan menjadi salah satu strategi. Dalam perjalanan pembangunan wilayah di Jawa Timur upaya pewilayahan pembangunan ini telah dilakukan oleh pemerintah propinsi Jawa Timur. Pertama kali upaya konsepsional perwilayahan hingga di tingkat strategi dilakukan dengan membagi wilayah Jawa Timur menjadi sembilan satuan wilayah pembangunan (SWP). Kota Kediri Dan Kabupaten Kediri termasuk dalam Pengembangan Perwilayahan Pembangunan di Satuan Wilayah Pembangunan VII.

Dalam usahanya untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hasil pembangunan tersebut harus dapat dinikmati oleh seluruh rakyat. Dengan demikian berarti pembangunan tersebut harus dilaksanakan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi harus dapat mencapai kenaikan produksi barang-barang dan jasa di berbagai sektor ekonomi yang mencakup sektor produksi primer (pertanian; pertambangan dan galian), sektor produksi sekunder (industri; bangunan/konstruksi; listrik, gas dan air minum), dan sektor produksi tersier pemerintahan; perdagangan, hotel dan restoran; keuangan dan perbankan; perhubungan, pengangkutan dan komunikasi; jasa-jasa). Disamping itu perlu upaya membuat integrasi ekonomi antara dua wilayah atau lebih yang secara konseptual dan empirik mempunyai hubungan fungsional. Pola pertumbuhan ekonomi yang terpusat kepada sector komersial dan mengumpul di kawasan pusat pertumbuhan

jelas kurang mampu membuat pertumbuhan ekonomi berjalan secara berkelanjutan.

Tujuan akhir dari pembangunan itu adalah suatu kesejahteraan umum. Menurut Sukirno (1985: 13) pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Jelas dapat dilihat dari definisi tersebut bahwa pembangunan ekonomi merupakan: (i) suatu proses yang berarti perubahan terus-menerus, (ii) suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, dan (iii) pendapatan perkapita itu terus-menerus meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Menurut Irawan dan Suparmoko (1987: 5) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Saat ini pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan yang bersifat desentralisasi, dimana pembangunan nasionalnya didasarkan pada pembangunan daerah-daerahnya. Keragaman wilayah yang terdapat di Indonesia merupakan tantangan pembangunan nasional sehingga diperlukan perencanaan yang bersifat regional. Menurut Tarigan (2005: 1) bahwa ilmu ekonomi regional atau ilmu ekonomi wilayah adalah suatu cabang dari ilmu ekonomi yang dalam pembahasannya memasukkan unsur perbedaan potensi satu wilayah dengan wilayah lain. Dalam pembangunan regional, setiap wilayah membutuhkan kebebasannya dalam mengelola wilayahnya. Namun demikian tetap tidak bisa lepas dari pemerintah pusat. Ada diantara tujuan ekonomi yang tidak mungkin

dilakukan daerah, apabila daerah itu bekerja sendiri, yaitu menstabilkan tingkat harga. Namun, di lain sisi, daerah karena wilayahnya yang lebih sempit, dapat membuat kebijakan yang lebih bersifat spasial sehingga ada hal-hal yang dapat dilakukan oleh daerah secara lebih baik daripada oleh pemerintah pusat. (Tarigan, 2005: 5).

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan keputusan politik pemberlakuan Otonomi Daerah yang dimulai tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis kearah desentralistik partisipatoris. Selanjutnya, Undang-undang nomor 32 tahun 2004, Undang-undang nomor 33 tahun 2004 telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh dan bertanggungjawab pada daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa pertanggung-jawaban berupa konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul dalam mencapai tujuan pemberian otonom

berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk mendayagunakan dengan baik agar terjadi kesinambungan *multiplier effect*, dan *spread effect* dalam pembangunan. Setelah diketahui fungsi dari beberapa kota yang mempunyai skala pelayanan regional maupun sub regional disusunlah konsep perwilayahan. konsep perwilayahan: pertama adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara pusat pemukiman dan wilayah sekitarnya yang kedua adalah homogenitas wilayah, ketiga adalah ekologi wilayah, dan yang terakhir adalah perwilayahan sektoral.

Fungsi kota dalam semangat desentralisasi adalah: sebagai pusat kegiatan yang membentuk suatu wilayah pelayanan tertentu (regional beberapa kecamatan) sesuai dengan struktur kota; sebagai simbol jasa distribusi yang mencakup kegiatan konsumsi, perdagangan dan pemasaran (sistem alokasi dan sistem distribusi); sebagai tempat fungsi tertentu berdasarkan kegiatan intensif yaitu sebagai kegiatan skunder dan tersier; penempatan fungsi kota yang mendukung pengembangan kegiatan yang ada di wilayah *hinterlandnya*.

Kabupaten Kediri dan Kota Kediri merupakan kawasan yang spesifik yakni kota Kediri dipandang sebagai pusat pertumbuhan sedang Kabupaten Kediri adalah wilayah *hinterland* (belakang) berbasis pertanian yang secara ekonomi menjadi basis sumberdaya bagi pusat pertumbuhan di Kota Kediri.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Seberapa besar peranan Kota Kediri sebagai pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan daerah-daerah hinterlandnya?
- b. Bagaimanakah hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri terhadap Kabupaten Kediri?
- c. Apakah ada hubungan integrasi ekonomi antara Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, dilihat dari pertumbuhan ekonomi , kesempatan kerja dan ketersediaan infrastruktur?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini meliputi :

- a. Untuk mengetahui peranan Kota Kediri sebagai pusat pertumbuhan terhadap daerah-daerah hinterlandnya.
- b. Untuk mengetahui hubungan kausalitas antara pertumbuhan ekonomi di Kota terhadap Kabupaten Kediri.
- c. Untuk mengetahui hubungan integrasi ekonomi antara Kota Kediri dan Kabupaten.Kediri, dilihat dari pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja dan ketersediaan infrastruktur

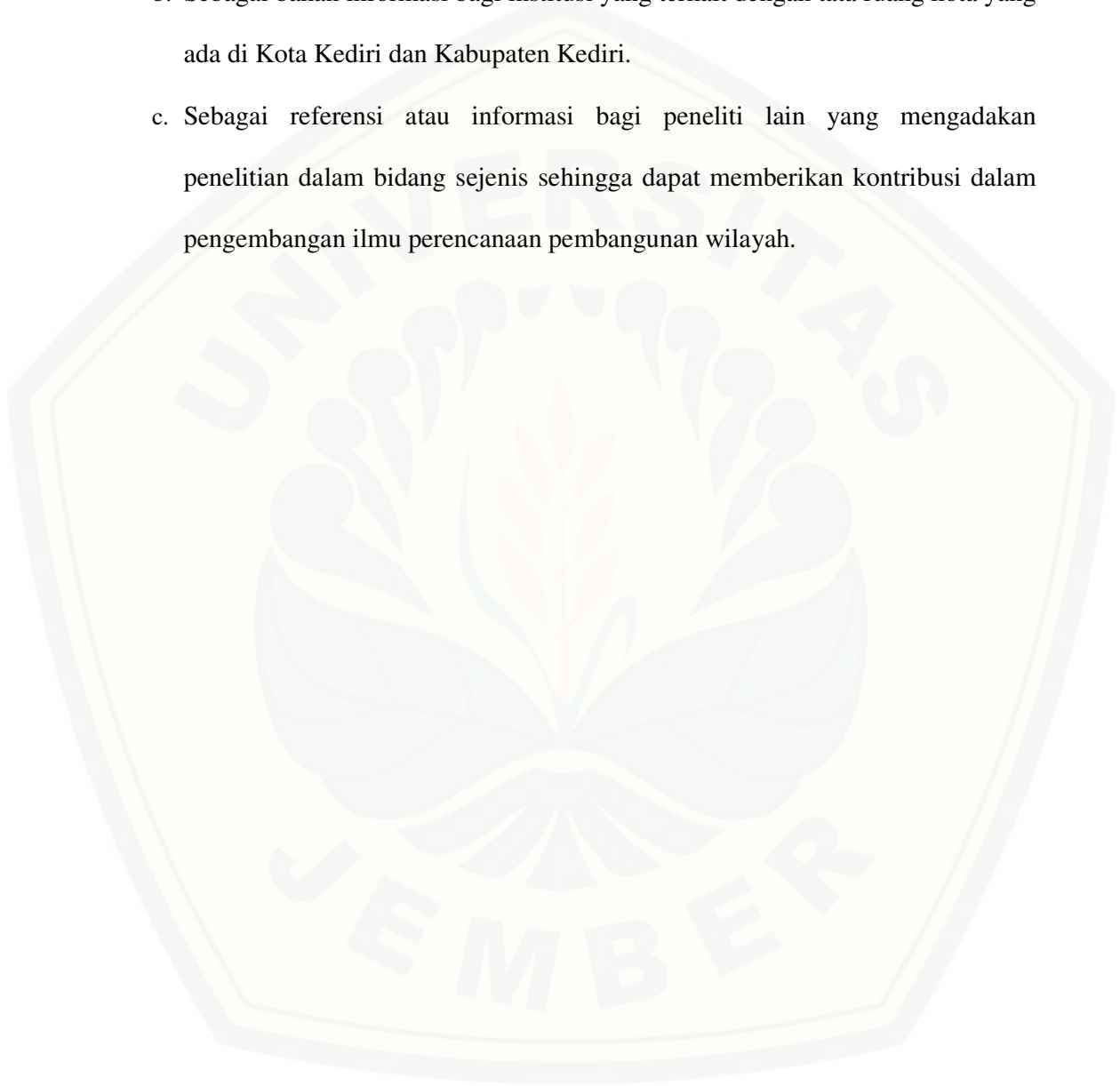
1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri dalam menentukan kebijakan ekonomi terutama kepada

pejabat-pejabat Pemerintah Daerah mengenai tata ruang kota agar dapat menimbulkan multiplier effect dan spread effect.

- b. Sebagai bahan informasi bagi institusi yang terkait dengan tata ruang kota yang ada di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.
- c. Sebagai referensi atau informasi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam bidang sejenis sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu perencanaan pembangunan wilayah.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teori

Dalam tinjauan teori akan diuraikan beberapa teori yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain :

2.1.1 Pembangunan Ekonomi

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu Negara, namun lebih dari itu pembangunan memiliki perspektif yang luas. Dimensi sosial yang sering terabaikan dalam pendekatan pertumbuhan ekonomi justru mendapat tempat strategis dalam proses pembangunan. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktivitas ekonomi terhadap kehidupan social masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kearah yang lebih baik.

Pembangunan selalu menimbulkan dampak positif maupun negatif. Menurut Meier difinisi pembangunan ekonomi adalah suatu proses dimana pendapatan percapita suatu negara meningkat selama kurun waktu yang panjang dengan catatan bahwa jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan absolute tidak meningkat dan distribusi pendapatan tidak semakin timpang (Meier,1995: 7 dalam Kuncoro, 2006: 12).

Menurut Sadono Sukirno (2006: 3) pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi. Sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja bertambah, tingkat pendapatan meningkat dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi.

Menurut Arsyad (2004: 11) pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil perkapita penduduk suatu Negara dalam jangka waktu yang panjang dan disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan.

Dari definisi tersebut maka pembangunan ekonomi mempunyai pengertian: (i) suatu proses yang berarti perubahan secara terus-menerus, (ii) suatu usaha untuk meningkatkan pendapatan perkapita, (iii) pendapatan perkapita itu terus-menerus meningkat dalam jangka waktu yang panjang, dan (iv) Perbaikan sistem kelembagaan di segala bidang.

Untuk Pembangunan Ekonomi Daerah diartikan sebagai suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor Swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut (Arsyad, 2005: 108).

Dari pengertian tersebut dapat dijelaskan bahwa proses yang mencakup pembentukan institusi-institusi baru, pembangunan industri-industri alternative, perbaikan kapasitas tenaga yang ada untuk menghasilkan produk dan jasa yang lebih baik, identifikasi pasar-pasar baru, alih ilmu pengetahuan dan pengembangan perusahaan-perusahaan baru dengan tujuan utama untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat yang ada didaerah dan wilayah.

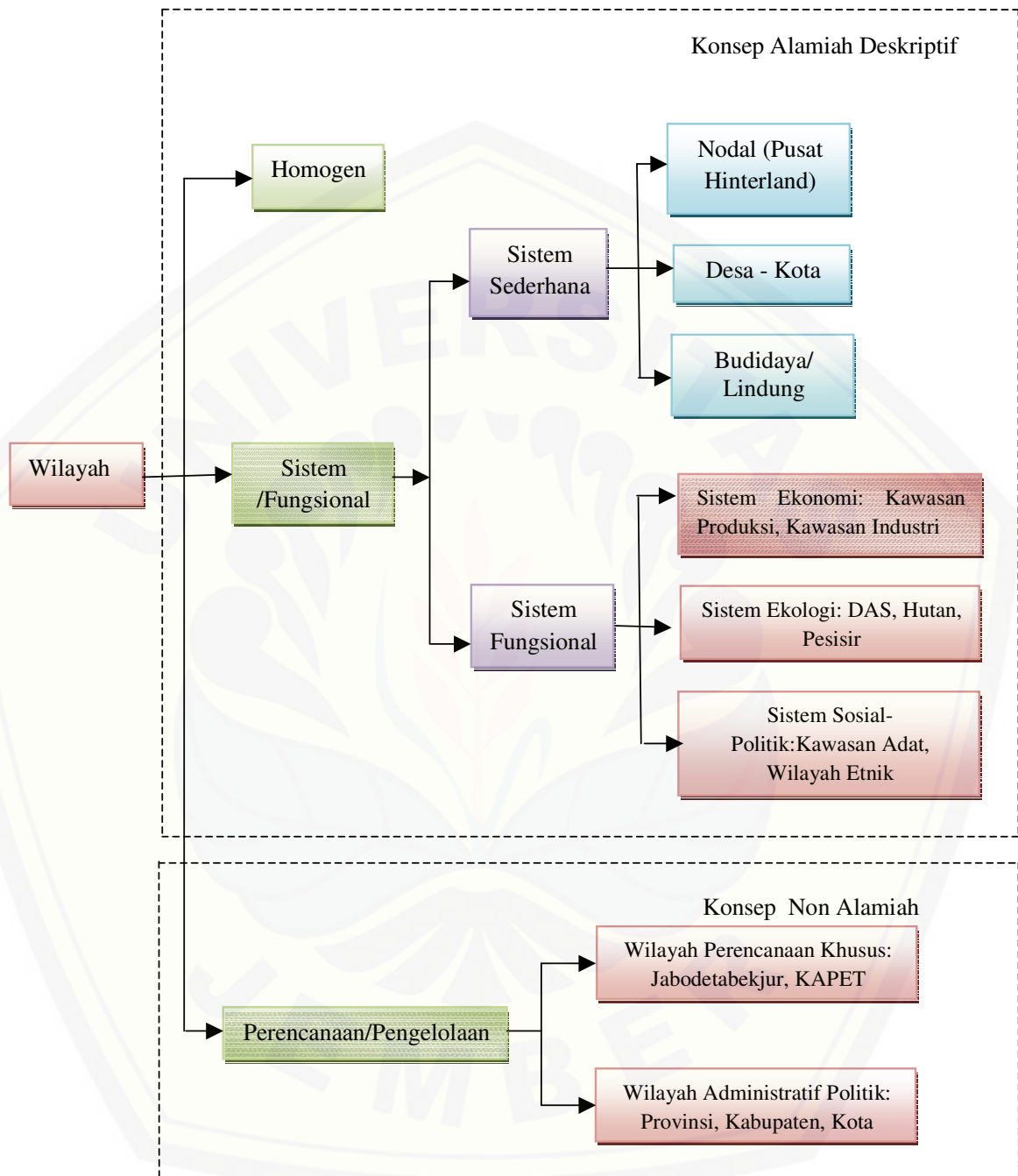
2.1.2 Pengertian Wilayah

Dalam Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, pengertian Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dari pengertian wilayah terlihat bahwa tidak ada batasan specific dari luasan suatu wilayah, dan batasan yang ada lebih bersifat memiliki arti (*meaningful*) untuk perencanaan , pelaksanaan, monitoring, pengendalian dan evaluasi. Dengan demikian pengertian wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada didalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Keragaman dalam menjelaskan konsep wilayah terjadi karena perbedaan dalam permasalahan ataupun tujuan pengembangan wilayah yang dihadapi. Kenyataannya tidak ada konsep wilayah yang benar-benar diterima secara luas. Para ahli cenderung melepaskan perbedaan-perbedaan konsep wilayah terjadi sesuai dengan fokus masalah dan tujuan-tujuan pengembangan wilayah.

Konsep wilayah menurut Clift dan Frey (1977) dalam bukunya Rustiadi(2009: 27) mengenai tipologi wilayah, membagi wilayah kedalam tiga kategori: Wilayah Homogen; Wilayah Nodal ; Wilayah Perencanaan. Menurut pandangan Ernan Rustiadi, kerangka klasifikasi konsep wilayah yang lebih mampu menjelaskan berbagai konsep Wilayah Homogen; Wilayah Nodal ; Wilayah Perencanaan. Untuk klasifikasi konsep wilayah ini, wilayah nodal dipandang sebagai salah satu bentuk dari konsep wilayah system.Sedangkan dalam kelompok wilayah perencanaan, terdapat konsep wilayah perencanaan ; konsep wilayah administratif-politis dan wilayah perencanaan fungsional.

Berikut gambar tentang sistematika pembagian dan keterkaitan berbagai konsep-konsep wilayah (Ernan Rustiadi, dkk., 2009 : 28):



Gambar 2.1 Sistematika Konsep-Konsep Wilayah (Ernan Rustiadi, dkk., 2009: 28)

2.1.3 Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai tujuan-tujuan yaitu (Hadjisaroso, 1982 : 1) : (1) mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya; (2) memperoleh kesatuan ekonomi nasional; (3) memelihara efisiensi pertumbuhan nasional. Ketiga tujuan tersebut saling berkaitan dan berjalan searah, satu diantara ketiganya merupakan titik sentral, yaitu keseimbangan antara daerah dalam tingkat pertumbuhannya.

Konsep pengembangan wilayah memerlukan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhannya. Tingkat pertumbuhan yang tinggi serta merata mendorong suatu daerah untuk memperkokoh kesatuan ekonomi nasional. Keseimbangan antar daerah akan memperkokoh ekonomi nasional, yang secara tidak langsung akan terpelihara pertumbuhan nasional yang efisien (Hadjisaroso, 1982 : 1 – 2).

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, dalam konsep pengembangan wilayah dapat ditingkatkan dengan pemilihan lokasi yang dinilai paling menguntungkan antara yang menghasilkan barang atau jasa, hal ini tidak mengurangi kecenderungan untuk tetap berkelompok, mengingat bahwa (a) berkelompoknya kegiatan usaha tetap merupakan langkah yang menguntungkan, dan (b) kegiatan usaha penghasil jasa mudah menyesuaikan diri, sehubungan dengan ciri-ciri pelayanannya, yaitu yang berjangkauan lokal maupun berorientasi ke dalam saja (Hadjisaroso, 1982 : 7).

Konsep Pengembangan Wilayah Regional mendefinisikan suatu wilayah, yaitu sebutan untuk lingkungan permukaan bumi pada umumnya dan tentu

batasnya. Untuk lebih menyederhanakan pengertian wilayah, dibagi wilayah nasional dan wilayah daerah regional. Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara. Daerah regional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan Pemerintah Daerah. Sebagai contoh adalah batas propinsi, kabupaten, kotamadya, kecamatan dan desa. Wilayah Nasional terbagi dalam daerah-daerah, dalam pelaksanaannya menerapkan kebijaksanaan nasional melalui proses pengaturan pemerintah daerah regional (Hadjisaroso, 1982 : 7).

Realisasi dari kebijaksanaan pembangunan tersebut dibentuklah wilayah-wilayah pembangunan yang dikelompokkan berdasarkan perbatasan daerah, dengan memperhatikan pengaruh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi akan digantikan pengaruh dari pusat lainnya. Satuan Wilayah Pembangunan merupakan berbagai jenis kegiatan yang tercakup dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dan pelaksanaannya diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat melalui proyek pengembangan antar sektor, pada satu atau lebih Wilayah Pembangunan yang menghubungkan beberapa daerah untuk membentuk kegiatan hubungan tiap sektor ekonomi. Dengan adanya SWP diharapkan tingkat pertumbuhan antar wilayah pembangunan dapat ditingkatkan.

Peningkatan pada kawasan dapat pula diartikan sebagai peristiwa pengembangan pada wilayah bersangkutan, maka keseluruhan usaha yang mengarah pada perbaikan dalam tingkat kesejahteraan hidup masyarakat dapat dipandang sebagai penyebab berlangsungnya proses perkembangan wilayah.

Proses berkembangnya wilayah berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu yang disebut dengan satuan mekanisme pengembangan (Hadjisaroso, 1982 : 8).

Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) adalah tinjauan obyek “seperti adanya” atas produk dari proses berkembangnya wilayah yang berlaku untuk tiap satu satuan mekanisme pengembangan. Pada wilayah nasional dapat dijumpai satu atau lebih, namun berbeda dengan pengertian daerah, wilayah nasional tidak selalu terbagi dalam SWP-SWP tergantung pada tingkat pengembangan SWP-SWP bersangkutan. Satu SWP dapat mencakup bagian dari suatu daerah atau mencakup bagian-bagian dari beberapa daerah ataupun keseluruhan bagian dari sejumlah daerah (Hadjisaroso, 1982 : 18).

Pengaruh besar adanya kebijaksanaan SWP ini akan tercapai kesempatan untuk tumbuh kegiatan-kegiatan usaha lebih tinggi, sehingga pertumbuhan suatu daerah akan lebih tinggi. Kebijaksanaan SWP bertujuan untuk mencapai kemudahan-kemudahan pengembangan suatu daerah serta mewujudkan keseimbangan antar daerah untuk lebih efektif dan efisien.

Pengembangan SWP terjadi oleh pertumbuhan modal yang bertumpu pada pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alamnya. Pengembangan kedua jenis sumber daya berlangsung sedemikian rupa, sehingga menimbulkan arus barang. Timbulnya arus barang merupakan sumber kekuatan pengembangan untuk pertumbuhan modal. Makin luas jangkauan arus barang, akan makin besar pula kesempatan terbuka untuk pertumbuhan modal. Luas jangkauan arus barang

ditentukan oleh tinggi nilai ataupun nilai tambah pada barang tersebut (Hadjisaroso, 1982: 12).

a. Sistem Perwilayahan

Memperhatikan keterkaitan antar wilayah, fungsi dan peran pelayanan tersebut dari hirarki dan sistem kota-kota di suatu wilayah misalnya Jawa Timur, ke depan pengelolaan pengembangan wilayah pola regionalisasi wilayah perkembangan/pembangunan masih tetap di perlukan untuk memperkecil kepincangan-kepincangan pembangunan dan perbedaan kemakmuran antar wilayah. Konsep pusat pembangunan masih akan diterapkan namun dengan strategi pengelolaan pada sistem pekotaan yang dimodifikasi. Sehingga fungsi satuan wilayah pembangunan tersebut dapat efektif berfungsi dalam:

- 1) Menciptakan keserasian dan keseimbangan struktur ruang wilayah.
- 2) Sebagai pusat pertumbuhan bagi wilayah hinterlandnya, diharapkan mampu sebagai motor penggerak pembangunan.
- 3) Sebagai motor penggerak perekonomian wilayah.
- 4) Sebagai stimulator bagi perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian wilayah.

Sehingga peran Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) yang direncanakan diharapkan :

- 1) Menciptakan keserasian dan keterpaduan struktur ruang secara hirarkhi dari tingkat pelayanan lokal sampai pelayanan regional.
- 2) Merupakan bagian strategi kebijakan pembangunan keruangan wilayah;

- 3) Merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur tata ruang nasional, propinsi dan kota/kabupaten;

b. Sistem Prasarana Wilayah

Penataan Struktur Tata Ruang di suatu wilayah secara umum diarahkan untuk mendukung pemerataan dan perkembangan wilayah yang bersangkutan. Struktur tata ruang tersebut perlu didukung dengan pengembangan prasarana wilayah terutama prasarana transportasi yang dapat menghubungkan antar pusat kegiatan dan entitas kegiatan ekonomi di masing-masing satuan wilayah pembangunan atau pusat pertumbuhan yang telah ditentukan sehingga dapat mendorong interaksi kegiatan antar pusat pertumbuhan dengan wilayah belakangnya atau antar satuan wilayah pembangunan .

Penataan ruang tersebut didukung dengan penataan prasarana wilayah yang pada akhirnya akan memantapkan pola struktur ruang wilayah. Pola penataan prasarana wilayah yang mendukung pemantapan pola struktur ruang wilayah di Jawa Timur di arahkan sebagai berikut: Rencana pengembangan jaringan jalan diarahkan dalam dua pola yaitu: peningkatan sarana dan prasarana yang diarahkan untuk melayani kebutuhan perkembangan saat ini serta pengembangan prasarana wilayah untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Jawa Timur dan meningkatkan keterkaitan antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah belakang.

Rencana pengembangan prasarana wilayah yang mendukung pemantapan struktur meliputi rencana pengembangan jaringan jalan, terminal, kereta api,

bandara dan pelabuhan. Pengembangan prasarana wilayah terkait dengan penataan struktur ruang wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut :

c. Arahan Pengembangan Sistem Prasarana Wilayah

Prasarana wilayah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perwilayahan dan tata ruang, maupun struktur pelayanan dan kegiatan (baik itu internal wilayah maupun keterkaitannya dengan eksternal wilayah). Tingkat urgensi ini dicerminkan dengan saling mempengaruhi antara perwilayahan dan keberadaan infrastruktur. Prasarana Wilayah terdiri atas: transportasi (darat, laut dan udara), irigasi (terkait dengan persediaan air dan sistem pengaliran irigasi), energi (listrik, gas), komunikasi (telepon, berkait dengan pengembangan dan sistem jaringan), tata air (drainase, dan air baku).

Berbagai prasarana wilayah di Jawa Timur ternyata banyak terkonsentrasi di beberapa wilayah saja, terutama kawasan perkotaan. Sebaliknya terdapat beberapa wilayah yang sangat kekurangan prasarana secara umum, ataupun wilayah yang memerlukan perhatian secara lebih khusus, seperti: wilayah kepulauan dan wilayah yang memiliki akses yang rendah. Pada sisi lain untuk mendorong perkembangan wilayah di Jawa Timur sedang dikembangkan berbagai prasarana wilayah dalam skala besar seperti: Pengembangan jalan tol antar wilayah, pengembangan Jembatan Suramadu, Jalan Lintas Selatan, Pembangkit Tenaga Listrik Nasional, Pengembangan jaringan gas dan sebagainya.

d. Prasarana Transportasi

Untuk menunjang pemerataan pembangunan di wilayah Jawa Timur pada khususnya, peranan transportasi sangat dominan sebagai akses penghubung antar

wilayah dan mendukung kegiatan koleksi dan distribusi barang dan jasa. Adapun kajian transportasi ini terdiri atas transportasi darat, laut dan udara.

1) Transportasi Darat

Transportasi darat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yakni jalan raya, kereta api dan penyeberangan. Jalan raya dalam hal ini akan terkait dengan: jaringan jalan, terminal penumpang, terminal kargo dan peti kemas; sedangkan kereta api mengkaji tentang jaringan dan tipe pelayanan.

Jaringan jalan di Jawa Timur memegang peran utama dalam mendorong pertumbuhan wilayah maupun pelayanan pergerakan barang dan manusia. Arahannya dikembangkan berdasarkan atas orde kota, tingkat perkembangan kota, hubungan antar wilayah yang lebih luas. Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder. Sistem jaringan jalan primer merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional, dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan. Sistem jaringan jalan sekunder merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di dalam kawasan perkotaan. Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus. Jalan umum tersebut dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas.

Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, dan jalan lingkungan. Jalan arteri merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh,

kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna. Jalan arteri meliputi jalan arteri primer dan arteri sekunder. Jalan arteri primer merupakan jalan arteri dalam skala wilayah tingkat nasional, sedangkan jalan arteri sekunder merupakan jalan arteri dalam skala perkotaan. Jalan kolektor merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi. Jalan kolektor meliputi jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder. Jalan kolektor primer merupakan jalan kolektor dalam skala wilayah, sedangkan jalan kolektor sekunder dalam skala perkotaan.

Jalan umum menurut statusnya dikelompokkan ke dalam jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, dan jalan desa. Selanjutnya, terkait dengan arahan pengembangan transportasi jalan di Jawa Timur akan dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut:

2) Jalan Nasional

Jalan nasional merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta jalan tol. Jalan strategis nasional adalah jalan yang melayani kepentingan nasional atas dasar kriteria strategis yaitu mempunyai peranan untuk membina kesatuan dan keutuhan nasional, melayani daerah-daerah rawan, bagian dari jalan lintas regional atau lintas internasional, melayani kepentingan perbatasan antar negara, serta dalam rangka pertahanan dan keamanan. Sedangkan pengembangan jalan tol dilakukan untuk:

- a) Memperlancar lalu lintas di daerah yang telah berkembang.

- b) Meningkatkan hasil guna dan daya guna pelayanan distribusi barang dan jasa guna menunjang peningkatan pertumbuhan ekonomi.
- c) Meringankan beban dana pemerintah melalui partisipasi pengguna jalan.
- d) Meningkatkan pemerataan hasil pembangunan dan keadilan.

Pengusahaan jalan tol dilakukan oleh Pemerintah dan/atau badan usaha yang memenuhi persyaratan, sedangkan pengguna jalan tol dikenakan kewajiban membayar tol yang digunakan untuk pengembalian investasi, pemeliharaan, dan pengembangan jalan tol. Jalan tol sebagai bagian dari sistem jaringan jalan umum yang merupakan lintas alternatif. Dalam keadaan tertentu, jalan tol dapat tidak merupakan lintas alternatif. Yang dimaksud dengan keadaan tertentu adalah kondisi pada saat jalan umum belum ada, sementara untuk keperluan pengembangan kawasan tertentu diperlukan jalan tol. Jalan tol harus mempunyai spesifikasi dan pelayanan yang lebih tinggi daripada jalan umum yang ada. Pengusahaan jalan tol dilaksanakan dengan maksud untuk mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional.

3) Jalan Propinsi

Jalan propinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota propinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antar ibukota kabupaten/kota, dan jalan strategis propinsi. Jalan strategis propinsi adalah jalan yang diprioritaskan untuk melayani kepentingan propinsi berdasarkan pertimbangan untuk membangkitkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan dan keamanan propinsi.

Mengingat Jawa Timur memiliki area yang sangat potensial untuk dikembangkan, sementara itu banyak terdapat jalan potensial yang dapat ditingkatkan fungsinya untuk menghubungkan antar wilayah, maka dapat dikembangkan jalan tembus antar antar kawasan perkotaan, atau antar kawasan yang memiliki nilai strategis di Jawa Timur.

Pada sisi lain juga diperlukan pengembangan jalan penghubung utama di bagian Selatan Jawa Timur sehingga banyak potensi yang dapat diangkat dan dikembangkan lebih lanjut. Jalan dimaksud adalah Jalur Lintas Selatan (JLS). Jalan ini diarahkan untuk berkembang disekitar Pantai Selatan mulai dari Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi. Pengembangan ini juga harus diikuti oleh jalan penghubung dengan perkotaan utama di Jawa Timur.

2.1.4. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a) Teori Tempat Sentral

Dirumuskan oleh Walter Cristaller (1933:86) yang melakukan studi persebaran pemukiman, desa dan dikenal sebagai teori pertumbuhan perkotaan yang tergantung pada spesialisasinya dan pada dasarnya fungsi suatu pusat kota adalah sebagai pusat pelayanan bagi daerah-daerah belakangnya, menyuplai barang dan jasa, seperti jasa perdagangan, perbankan, fasilitas pendidikan, hiburan serta jasa-jasa dari pemerintah kota/daerah. Tingkat permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah sekitarnya dengan memperhatikan *demand threshold* dan *demand range* akan menentukan kecepatan pertumbuhan kota

(tempat pemusatan) tersebut. Terdapat empat faktor yang menyebabkan timbulnya pusat-pusat pelayanan : 1) faktor sosial ekonomi, 2) faktor ketersediaan sumber daya, 3) kekuatan aglomerasi, dan 4) faktor investasi pemerintah.

b) Teori Kutub Pertumbuhan

Francois Perroux (Sihotang, 2001: 98) Kutub Pertumbuhan Regional adalah seperangkat industri sedang berkembang yang berlokasi di daerah perkotaan dan mendorong perkembangan lanjutan dari kegiatan ekonomi di daerah pengaruhnya,yang terdiri dari satu kumpulan industri-industri yang mengalami kemajuan dan saling berhubungan, serta cenderung menimbulkan aglomerasi yang disebabkan faktor ekonomi eksternal. Konsep dasar ekonomi dari pada kutub pertumbuhan :

- 1) Konsep Industri utama dan industri pendorong
- 2) Konsep Polarisasi, pertumbuhan daripada industri utama dan perusahaan pendorong akan menimbulkan polarisasi unit-unit ekonomi lain ke pusat pertumbuhan.
- 3) Terjadinya Aglomerasi, yang ditandai: *Scale Economies, Localization, Urbanization Economies.*

c) Teori Titik/Pusat Pertumbuhan :

Francois Perroux (Sjafrizal, 2008: 127), perkembangan modern teori titik pertumbuhan berasal dari teori kutub pertumbuhan yang diperkenalkan pertama kali Francois Perroux seorang Ekonom Perancis pada tahun 1955 sebagai reaksi atas pandangan ekonom pada itu adalah Casel (1927) dan Schumpeter (1951) yang berpendapat bahwa transfer pertumbuhan antar wilayah umumnya berjalan

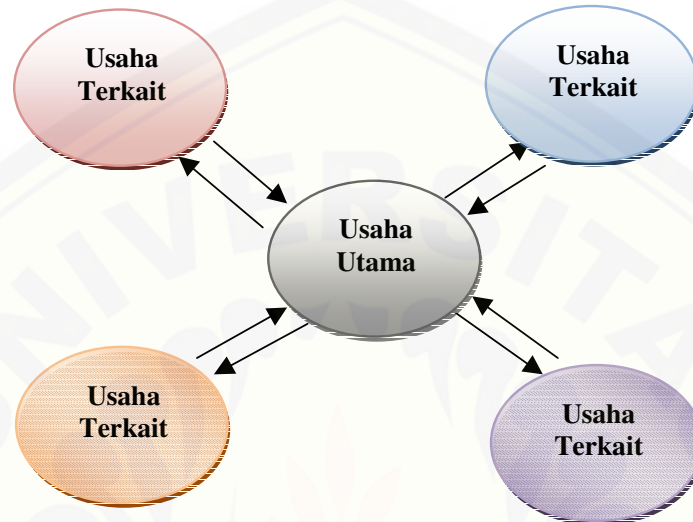
lancar, sehingga perkembangan penduduk, produksi dan kapital tidaklah selalu proporsional antar waktu. **Pemikiran dasar dalam konsep titik/pusat pertumbuhan** adalah kegiatan ekonomi di daerah cenderung beraglomerasi di sekitar sejumlah kecil titik lokal (pusat), arus polarisasi akan bergravitasi ke arah titik-titik lokal, yang walaupun karena jarak arus tersebut berkurang, dimana disekitar titik lokal dapat ditentukan garis perbatasan di mana kepadatan arus turun sampai tingkat kritis minimum, pusat tersebut dapat dikatakan titik pertumbuhan, sedangkan daerah di dalam garis perbatasan adalah daerah pengaruhnya.

Pertumbuhan tingkat pendapatan di daerah secara keseluruhan akan maksimum bila pembangunan dikonsentrasikan pada titik-titik pertumbuhan yang tersebar diseluruh wilayah, sehingga interaksi antara masing-masing titik pertumbuhan dengan daerah pengaruhnya merupakan unsur penting dalam interaksi.

Ada beberapa karakteristik pusat pertumbuhan antara lain (Syafrizal , 2008:130):

- 1) Adanya sekelompok kegiatan ekonomi terkonsentrasi pada lokasi tertentu, konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut mampu mendorong pertumbuhan ekonomi secara dinamis dalam perekonomian
- 2) Keterkaitan input dan output yang kuat antara sesama kegiatan ekonomi pada pusat tersebut
- 3) Terdapat industri induk dalam kegiatan ekonomi yang mendorong perkembangan kegiatan ekonomi pada pusat tersebut.

Dari beberapa karakteristik pusat pertumbuhan (Sjafrizal,2008: 130) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.2 Struktur Ekonomi Pusat Pertumbuhan (Sjafrizal,2008: 130)

Dari gambar diatas dapat jelaskan bahwa secara umum struktur ekonomi dari sebuah pusat pertumbuhan akan terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang didalamnya terdapat sebuah kegiatan ekonomi yang berfungsi sebagai industri induk dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya yang saling terkait satu sama lainnya dari segi input dan out put. Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha khususnya kegiatan pertanian, pusat pertumbuhan pada dasarnya menganut konsep agribisnis yang melibatkan kegiatan produksi dan pengolahan hasil dan pemasaran produk.

Pandangan ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial ekonomi dan proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika

kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan *hinterland* dan pedesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena *trickle down effect* (dampak penetesan ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah *hinterland*. Selain itu respon pertumbuhan di pusat tidak cukup menjangkau wilayah *hinterland* karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Syafrizal, 2002).

Konsep dasar teori pusat pertumbuhan dan kutub pertumbuhan dapat didefinisikan sebagai berikut :

- a) Konsep leading industries dan perusahaan-perusahaan propulsif, menyatakan pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan yang propulsif dan besar yang termasuk dalam leading industries yang mendominasi unit ekonomi lainnya;
- b) Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari *leading industries* mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi lainnya ke kutub pertumbuhan;
- c) Konsep *spread effects* menyatakan bahwa pada waktu kualitas *propulsive* dinamik pada kutub pertumbuhan akan memancar keluar dan memasuki ruang sekitarnya. *Spread effects* dikenal juga dengan *trickle down effects* sangat menarik bagi perencanaan regional dan telah memberi sumbangan besar bagi teori pusat pertumbuhan sebagai sarana kebijaksanaan (Glasson, 1991: 172).

Menurut Mirdal (dalam Jhingan, 2000: 214) menyatakan bahwa dampak balik dan sebar tidak mungkin berjalan seimbang. Dalam mendukung pendapatnya Mirdal mengutip dua korelasi umum: *pertama* ketimpangan regional lebih besar di negara miskin daripada di negara kaya, dan yang *kedua* di negara miskin ketimpangan akan semakin melebar sedangkan di negara kaya ketimpangan menyempit.

Analisis tentang pertumbuhan mengandung hipotesis bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan secara keseluruhan akan mencapai maksimum apabila pembangunan dikonsentrasikan pada titik pertumbuhan. Interaksi ini mempunyai beberapa aspek antara lain :

Pertama, interaksi ini menimbulkan ketidak-seimbangan di daerah yang bersangkutan sebagai keseluruhan. Jika titik pertumbuhan dikaitkan dengan pusat pembangunan suatu kompleks industri baru, maka kompleks akan ditempatkan disekitar titik pertumbuhan itu sendiri. Pembentukan titik pertumbuhan ini adalah daerah-daerah ini bagaimanapun juga pasti sampai pada titik-titik stagnasi dan bahwa pengkonsentrasian ekspansi akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah yang bersangkutan secara keseluruhan;

Kedua, industri-industri penggerak di kutub pertumbuhan barang kali industri-industri ekspor yang melayani pasar-pasar ekstra regional. Teori titik pertumbuhan secara implisit bersumber pada konsep basis ekspor tetapi dengan memberinya dimensi ruang, karena industri-industri inti berlokasi pada titik pertumbuhan sedangkan industri-industri penyuplai, tracker, bahan-bahan mentah dan pelayanan-pelayanan independen terpencar-pencar di daerah pengaruh;

Ketiga, fungsi-fungsi tempat sentral dari titik pertumbuhan dapat memperjelas hubungan antara titik-titik pertumbuhan dan daerah pengaruhnya tersedia pelayanan sentral adalah salah satu keuntungan aglomerasi yang penting pada titik pertumbuhan. Titik pertumbuhan dan tempat sentral tidaklah identik, perbedaan yang paling menonjol adalah yang menopang pertumbuhan suatu tempat sentral adalah daerah komplementernya, maka yang menopang pertumbuhan lingkungan pengaruhnya adalah titik pertumbuhan (Richardson 2001: 99).

Jadi peranan pusat pertumbuhan sebagai sarana dan strategi pembangunan wilayah dimana pembangunan industri adalah justru yang merupakan jalan utama untuk menciptakan kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan yang mempunyai peran utama dalam pembangunan ekonomi. Fungsi pusat pertumbuhan sebagai pusat inovasi dan pendorong; sebagai industri: sebagai penyangga proses migrasi yaitu menyediakan lapangan kerja dan sebagai pengumpul, penyimpan, fasilitas pengolahan dalam ukuran besar. Perkembangan pusat pertumbuhan beserta daerah kotanya dapat mempunyai pengaruh timbal balik terhadap wilayah belakangnya (*hinterland*). Pengaruh ini dapat menguntungkan maupun merugikan bagi perkembangan wilayah secara keseluruhan. Pengaruh tersebut menguntungkan wilayah belakang (*hinterland*), jika kemajuan kota sebagai pusat pertumbuhan merembet keluar, misalnya dalam bentuk kenaikan pembelian barang-barang hasil wilayah belakang (*hinterland*) atau penanaman modal oleh orang-orang atau perusahaan-perusahaan kota di wilayah belakang (*hinterland*). Pengaruh semacam ini akan terjadi jika perekonomian kedua daerah (kota sebagai pusat pertumbuhan dan daerah belakangnya) itu adalah komplementer.

Di samping komplementaritas, perekonomian kota dapat memberantas pengangguran terselubung yang terdapat banyak di daerah belakangnya, dan dengan demikian menaikkan produktivitas marginal tenaga kerja dan tingkat konsumsi masyarakat daerah belakangnya. Pengaruh yang tidak menguntungkan atau yang merugikan daerah belakang terjadi jika aktivitas produksi di daerah itu sendiri dari industri manufaktur atau industri ekspor yang semacam dengan yang terdapat di kota, tetapi dalam tingkat yang lebih rendah, baik dalam hal efisiensi kerjanya maupun dalam kualitas produksinya. Dalam hal hubungan antara kota sebagai pusat pertumbuhan dan wilayah belakangnya dapat dibedakan antara kota-kota generatif dan kota-kota parasitif. Kota generatif adalah kota yang menjalankan bermacam-macam fungsi baik untuk dirinya sendiri, maupun untuk daerah belakangnya, yang menjamin penawaran barang-barang dan merupakan pasar bagi hasil produksinya. Makin besar kapasitas absorpsi daerah pemasaran maka makin besar pula kemungkinan untuk mengembangkan potensi-potensi daerah belakang.

Menurut para ahli perkotaan, besarnya kota adalah variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan kota. Pemahaman mereka mengenai hubungan antara kota besar dan pertumbuhan kota diperoleh dalam banyak bentuk. Beberapa ahli memandang kota sebagai lokasi untuk industri, dengan industrialisasi kota menjadi penting karena faktor ekonomi, karena industri menuntut banyak tenaga kerja dengan bermacam-macam ketrampilan. Selanjutnya faktor-faktor sekunder memperluas fungsi dan besarnya kota, karena konsentrasi penduduk menuntut jasa yang dibutuhkan seperti perumahan, jasa-jasa sosial,

fasilitas pemasaran, dan fasilitas hiburan. Pusat-pusat politik dan ekonomi cenderung bergeser ke kota. Sikap dan aspirasi kota memasuki seluruh lapisan masyarakat. Proses ini dipercepat dengan pengangkutan dan komunikasi yang baik (Spillane,1993: 5). Kota itu bukan hanya sebagai suatu organisasi ekonomi saja, kota juga merupakan suatu struktur fisik yang meliputi struktur arsitektur, suatu badan administratif, dan suatu organisasi sosial (Spillane 1993: 15). Lebih lanjut struktur ekonomi kota dianggap terdiri dari dua kategori utama, yang pertama kegiatan dasar yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dikirim keluar daerah perkotaan tersebut, dan yang kedua adalah kegiatan non dasar termasuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam kota, besarnya kota ini makin bertambah dengan bertambahnya fungsi kota.

Di dalam suatu daerah terdapat suatu pusat-pusat yang dominan (pemusatan penduduk dan industri). K arah mana arus penduduk, barang dan jasa, komunikasi dan lalu lintas bergravitasi bahkan dalam suatu kotapun terdapat pusat-pusat dimana sebagian besar usaha dari kegiatan bisnis komersial dan sosial kota terlaksana, yang terlihat dengan jelas jika misalnya kita melihat pada peta yang menggambarkan kepadatan lalu lintas antar kota (Richardson 2001: 59). Perkembangan kota beserta daerah kotanya dapat mempunyai pengaruh timbal balik terhadap daerah belakangnya (*hinterland*). Pengaruh ini dapat menguntungkan dapat juga merugikan. Pengaruh ini daerah belakang jika kemajuan kota itu merembet keluar seperti pembelian barang-barang hasil daerah belakang. Pengaruh semacam ini akan terjadi jika perekonomian kedua daerah (kota dan daerah belakangnya) adalah komplementer. Disamping

komplementaritas itu, perekonomian kota dapat mengurangi pengangguran terserlambung yang banyak terdapat di daerah belakangnya, dengan demikian dapat menaikkan produktivitas marginal tenaga kerja dan tingkat konsumsi masyarakat di daerah belakangnya.

Pertumbuhan ekonomi, yang berarti perluasan kegiatan ekonomi, adalah satu-satunya cara untuk meningkatkan penghasilan anggota masyarakat dan membuka lapangan kerja baru serta stabilitas ekonomi. Sedangkan stabilitas ekonomi merupakan cara untuk melindungi agar penghasilan masyarakat yang telah diupayakan tidak digerogeti oleh kenaikan harga. Jadi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas ekonomi bersama-sama merupakan kunci peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan yang adil dan merata (Budiono, 2009 : 29).

Sementara itu, perkembangan kemajuan perekonomian daerah menurut (Blakely dalam Mulyana, 2008:22) akan sangat ditentukan oleh empat faktor: **Pertama**, kesempatan kerja yang ada di daerah termasuk kualitas tenaga kerja; **Kedua**, basis pembangunan daerah dengan adanya pengembangan institusi ekonomi yang mampu mendorong peningkatan bagi kalangan dunia usaha; **Ketiga**, aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah yang didasarkan pada kualitas lingkungan; **Keempat**, sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong pengetahuan. Jadi pada dasarnya tujuan utama dari pembangunan ekonomi wilayah adalah untuk meningkatkan inisiatif daerah dalam menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakatnya serta peningkatan aktivitas ekonomi agar pendapatan masyarakat meningkat.

2.1.5 Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

Teori yang ada sekarang ini tidak mampu untuk menjelaskan kegiatan-kegiatan pembangunan ekonomi daerah secara tuntas dan komprehensif. Oleh sebab itu maka suatu pendekatan alternative terhadap teori pembangunan dirumuskan untuk kepentingan perencanaan pembangunan ekonomi daerah. Berikut merupakan sintesa dan perumusan kembali konsep-konsep yang telah ada. Pendekatan yang memberikan dasar bagi kerangka pikir dan rencana tindakan yang akan diambil dalam konteks pembangunan ekonomi daerah.

Berikut ini merupakan pendekatan tentang Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah:

Tabel 2.1 Paradigma Baru Teori Pembangunan Ekonomi Daerah

KOMPONEN	KONSEP LAMA	KONSEP BARU
Kesempatan kerja	Semakin banyak perusahaan = semakin banyak peluang kerja	Perusahaan harus mengembangkan pekerjaan yang sesuai dengan kondisi penduduk daerah
Basis Pembangunan	Pengembangan sektor ekonomi	Pengembangan lembaga-lembaga ekonomi baru
Aset-aset Lokasi	Keunggulan Komparatif didasarkan pada aset fisik	Keunggulan kompetitif didasarkan pada kualitas lingkungan
Sumberdaya pengetahuan	Ketersediaan Angkatan kerja	Pengetahuan Sebagai pembangkit ekonomi

Sumber : Lincolin Arsyad, 2005

2.1.6 Teori Lokasi Dan Analisa Ekonomi Spasial

Teori Lokasi merupakan teori dasar yang sangat penting dalam analisa spasial dimana tataruang dan lokasi kegiatan ekonomi merupakan unsur utama.

Teori lokasi memberikan kerangka analisa yang baik dan sistematis mengenai pemilihan lokasi kegiatan ekonomi dan sosial, serta analisa interaksi antar wilayah. Teori ini menjadi penting dalam analisa ekonomi karena pemilihan lokasi yang baik akan dapat memberikan penghematan yang sangat besar untuk ongkos angkut sehingga mendorong terjadinya efisiensi baik dalam bidang produksi maupun pemasaran. Sedangkan interaksi antar wilayah akan dapat pula mempengaruhi perkembangan bisnis yang pada gilirannya akan dapat pula mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Teori Lokasi pertama kali ditemukan oleh Von Thunen dari Jerman tahun 1851 tentang analisa lokasi kegiatan berdasarkan fakta di Eropa. Kemudian dikembangkan oleh William Alonso tahun 1964 sebagai landasan teori penggunaan (*land-use*) di daerah perkotaan yang selanjutnya dikembangkan pula untuk analisa lokasi perusahaan berdasarkan konsentrasi permintaan dan persaingan antar wilayah (*Spatial Competition*) dan kerangka yang lebih luas tentang Teori Harga Spasial dan Areal Pasar (Sjafrizal, 2008:19).

Dari perkembangan Teori Lokasi tersebut selanjutnya mendorong timbulnya analisa ekonomi spasial yang kemudian menjadi dasar utama yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek lokasi dan ruang terhadap pengambilan keputusan sosial ekonomi dan bisnis yang lebih konkrit dan realistis sesuai dengan kondisi geografi dan wilayah.

2.1.7 Analisis Wilayah Pelayanan (*Isoline*)

Jenssen (1995) menyatakan bahwa untuk lebih melengkapi akurasi informasi perlu dibentuk Isoline, yaitu suatu alat yang dapat digunakan untuk

menganalisis tingkat aksesibilitas suatu wilayah terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang ada di sekitar pusat-pusat perkotaan/pelayanan. Isoline dapat digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana fungsi-fungsi pelayanan dapat menjangkau pemukiman-pemukiman yang ada, dikaitkan dengan sarana dan prasarana transportasi. Selain itu, *isoline* diperlukan juga untuk mengetahui/membedakan antara daerah yang terintegrasi (terjangkau oleh fungsi pelayanan) dan yang tak terintegrasi (terisolir dari fungsi-fungsi pelayanan, biasanya daerah hinterland, atau daerah yang seharusnya berada dalam lingkungan target dari pusat pelayanan atau diluar lingkungan target pelayanan). *Isoline* adalah garis disekitar suatu pusat pelayanan) dalam jarak fisik atau waktu yang sama, diukur dari pusat perkotaan sepanjang sistem jalan. Jarak dapat dikonversikan menjadi waktu dengan menghitung kecepatan rata-rata untuk berbagai jenis jalan dan kesempatan transportasi. Jenis-jenis jalan tersebut dapat terbagi dalam jalan negara, jalan propinsi, jalan kabupaten/kota, jalan desa, bahkan jalan setapak. Titik-titik di antara alan-jalan di mana transportasi terjadi di jalan kecil atau setapak, harus dihitung dengan hati-hati. *Isoline* digunakan sebagai penaksiran untuk mengetahui sampai sejauh mana daerah pelayanan yang harus dijangkau oleh suatu unit pelayanan tertentu. Dalam menyusun isoline harus memenuhi dua syarat, yaitu: (1) mengetahui jenis-jenis jalan yang sering atau mungkin dapat dipergunakan sebagai prasarana mobilitas penduduk, baik dengan menggunakan sarana transportasi maupun tidak; dan (2) menentukan kecepatan tempuh kendaraan (Km/jam) secara wajar (tidak terlalu cepat atau lambat) dengan berdasarkan pada kelancaran jalan dalam situasi normal.

Manfaat dilakukannya analisis wilayah dengan menggunakan isoline bagi proses perencanaan pembangunan antara lain adalah: (1) Untuk melihat aksesibilitas masyarakat disuatu daerah atau wilayah terhadap fungsi-fungsi pelayanan berdasarkan fasilitas jalan yang ada; (2) Untuk melihat apakah suatu daerah dapat terlayani oleh fungsi-fungsi pelayanan yang ada dalam batas waktu tertentu; (3) Untuk memberikan informasi kepada para perencana dalam perencanaan pembangunan infrastruktur pada masa yang akan datang dengan melihat daerah-daerah dan aksesibilitasnya; (4) Untuk memaksimalkan pemafaatan fungsi-fungsi apabila pada masa yang akan datang akan diadakan, sehingga diharapkan akan mendorong efektivitas dan efisiensi dari setiap pembangunan yang dilakukan.

2.1.8 Kebijakan Otonomi Daerah Dan Desentralisasi Fiskal

Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang telah dilaksanakan sejak tahun 2001 adalah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Seiring dengan perubahan dinamika sosial politik, Pemerintah telah melakukan revisi beberapa materi dalam undang-undang otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dengan ditetapkannya Undang-undang(UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Substansi perubahan kedua undang-undang tersebut adalah semakin besarnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengelola pemerintahan dan keuangan daerah. Dengan demikian diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas daerah, sehingga dapat

memberikan dampak positif bagi perkembangan ekonomi regional, yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal sebagai salah satu instrumen kebijakan Pemerintah mempunyai prinsip dan tujuan, antara lain untuk:

- 1) Mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta antar daerah
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah;
- 3) Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional;
- 4) Tata kelola, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan kegiatan pengalokasian Transfer ke Daerah yang tepat sasaran, tepat waktu, efisien, dan adil;
- 5) Mendukung kesinambungan fiskal dalam kebijakan ekonomi makro.

2.1.9 Strategi Pembangunan Ekonomi Daerah

Didalam Strategi Pembangunan Daerah telah diketahui bersama bahwa kewilayahan dengan berbagai permasalahan yang dihadapi merupakan isu yang begitu kompleks. Untuk mendapatkan perspektif yang lebih baik dari situasi yang dihadapi pemerintah daerah, masing-masing strategi merupakan alternative pendekatan saat ini untuk mempertemukan satu atau lebih aspek – aspek kebutuhan masyarakat. Pendekatan Strategis tersebut meliputi:

a) Strategi Pembangunan Daerah (dimensi pembangunan lingkungan)

Alat guna mencapai tujuan pembangunan ada bermacam-macam, diantaranya Perencanaan dan pengendalian pembangunan, Perencanaan peningkatan pemukiman, penyediaan fasilitas publik.

b) Strategi Pengembangan Bisnis

Pengembangan bisnis merupakan suatu komponen yang penting dari perencanaan perekonomian daerah. Ada beberapa elemen dasar atau teknik dasar yang secara normal dari pengembangan pusat bisnis yaitu L pusat bantuan bagi usaha kecil, pusat teknologi dan bisnis, sistem pemasaran secara kelompok, perusahaan pembiayaan ventura, pusat informasi bisnis, program pengembangan dan kepariwisataan, penelitian dan pengembangan, pusat-pusat inkubasi, enterprise zones, entrepreneur development activities

c) Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan poros utama dari proses pembangunan ekonomi. Oleh karenanya upaya pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) haruslah melalui program yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, sejalan dengan peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Metode yang digunakan meliputi: Customized training, targeted placement, dan local employment program

d) Strategi Pembangunan Ekonomi yang menekankan pada lapangan pekerjaan masyarakatnya.

Metode yang digunakan meliputi: menciptakan kesempatan kerja untuk kelompok masyarakat khusus, menyediakan sektor ekonomi alternatif dan menengah untuk kegiatan perekonomian, mempromosikan manajemen yang demokratis pengendalian pada perusahaan-perusahaan.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh Nuraini (2001), yang berjudul Analisa Sub Satuan Wilayah Pengembangan Dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Malang Bagian Timur, bertujuan untuk mengetahui potensi ekonomi Sub Satuan Wilayah Pengembangan di Kabupaten Malang Bagian Timur dan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pusat Satuan Wilayah Pengembangan bagi pengembangan wilayah hinterlandnya di Kabupaten Malang Bagian Timur. Analisa yang digunakan adalah Analisa Gravitasi; Indeks Aksesibilitas dan Indeks Williamson. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Struktur perekonomian Kabupaten Malang didominasi oleh sektor tersier (51 %) , dominasi kedua adalah sektor primer (31 %) dan ketiga adalah sektor sekunder (18 %). Demikian pula dengan Sub Satuan Wilayah Pengembangan Malang Timur , Sektor Tersier juga merupakan sektor yang mendominasi pada Produk Domestik Regional Bruto. Sehingga sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan adalah sektor tersier. Ketimpangan pembangunan masih cukup tinggi, hal ini ditunjukkan dengan nilai Indek Williamson sebesar 0,9243 untuk SSWP Malang Timur Selatan dan 0,8739 untuk SSWP Malang Timur Utara). Sedang untuk Indek Aksesibilitas dan Analisa Gravitasi menunjukkan bahwa semakin dekat jarak suatu wilayah hinterland ke

pusat SSWP maka Indeks Aksesibilitasnya juga semakin besar, Hal ini menunjukkan bahwa semakin mudah sarana transportasinya. Demikian pula dengan analisa gravitasi, semakin besar Indeks Aksesibilitas maka daya grafitasinya juga semakin kuat. Hal ini berarti daerah yang dijadikan pusa SSWP mempunyai daya tarik bagi daerah hinterlannya. Semakin dekat jarak antara Pusat SSWP dengan hinterlandnya, semakin tinggi tingkat gravitasinya, artinya bahwa Pusat SSWP tersebut semakin memberikan daya tarik bagi wilayah hinterlandya.

Penelitian yang dilakukan Biro Pusat Statistik Propinsi Jawa Timur tahun 2000 – 2004 , tingkat kesenjangan ekonomi antar wilayah di Jawa Timur pada kurun waktu 2000 – 2004 menunjukkan nilai yang stabil . Ini menggambarkan bahwa kesenjangan antar Kabupaten / Kota dapat dijaga dengan baik dan menunjukkan keefektifan koordinasi Pemerintahan Propinsi Jawa Timur dalam membina pembangunan antar Kabupaten / Kota Walaupun tahun 2004 terdapat kenaikan, hal ini disebabkan tingginya pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang mencapai 5,43 %.

Penelitian tentang ketimpangan pembangunan antar wilayah DKI Jakarta dan diluar DKI Jakarta (Sjafrizal ,2002), hasil temuan yang menarik dari penelitian ini adalah bahwa pengaruh ibukota Jakarta terhadap ketimpangan antar wilayah di Indonesia ternyata cukup besar karena struktur ekonomi kota yang sangat berbeda dibandingkan dengan propinsi. Hal ini disebabkan oleh perbedaan struktur perekonomian daerah, dan sebelumnya telah diadakan studi tentang konsep pengembangan wilayah yang diarahkan untuk mengatasi kesenjangan wilayah, antara Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia, antar

kawasan dalam wilayah pulau, maupun antara kawasan perkotaan dan perdesaan. Perkembangan terakhir pada awal abad millennium, bahkan, mengarahkan konsep pengembangan wilayah sebagai alat untuk mewujudkan integrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia

Penelitian Diah Kumalasari (2002) yang berjudul Peranan Pusat Pertumbuhan Dan Kesenjangan Pendapatan Antar Wilayah Dalam Kaitan Pengembangan Perwilayahan Pembangunan Di Satuan Wilayah Pembangunan VII Kediri Tahun 1995—2000, bertujuan untuk mencari pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan kota sebagai pusat pertumbuhan dalam pengembangan suatu wilayah, ada tidaknya hubungan timbal balik antara pusat pertumbuhan dengan daerah *hinterlandnya*, kontribusi pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan daerah *hinterlandnya*, serta kesenjangan yang terjadi antar SWP di SWP VII Kediri. Dalam penelitian ini didapatkan hasil yang signifikan pada hipotesa yang diajukan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada analisis regresi yang digunakan ditemukan pengaruh laju pertumbuhan dari pusat pertumbuhan (kota) terhadap wilayah hinterland. Adapun pengaruh pusat pertumbuhan tersebut terhadap masing-masing daerah penyangganya adalah sebesar 93% terhadap laju pertumbuhan kota Blitar; 96,5% terhadap laju pertumbuhan Kabupaten Kediri; 88% terhadap laju pertumbuhan Kabupaten Trenggalek; 57,1% terhadap laju pertumbuhan Kabupaten Tulungagung; 97,1% terhadap laju pertumbuhan Kabupaten Nganjuk; 84,6% terhadap laju pertumbuhan Kabupaten Jombang. Sedangkan dari analisis indeks williamson diketahui bahwa nilai indeks williamson pusat pertumbuhan terhadap wilayah

hinterland SWP VII berkisar antara 0,021—0,398 yang menunjukkan bahwa kesenjangan pendapatan di SWP VII relatif kecil karena nilai indeks tersebut kurang dari 1. Adapun kabupaten yang memiliki indeks terkecil adalah Kota dan Kabupaten Kediri yaitu sebesar 0,021 dan yang terbesar adalah Kabupaten Jombang yaitu sebesar 0,398. Sedangkan pada analisis shift share menunjukkan sumbangan Kota Kediri terhadap masing-masing daerah hinterlandnya pada SWP VII adalah 11,5% pada Kota Kediri; -12,35% pada Kota Blitar; -3,65% pada Kabupaten Kediri; -3,05% pada Kabupaten Blitar; 13,13% pada Kabupaten Trenggalek; -4,21% pada Kabupaten Tulungagung; -7,99% pada Kabupaten Nganjuk; 22,22% pada Kabupaten Jombang. Pada analisis kausalitas engle grenger menunjukkan adanya hubungan timbal balik antara Kota Kediri dengan daerah-daerah penyangganya, hubungan yang nyata terjadi pada Kabupaten Kediri, Kota Blitar dan Kabupaten Nganjuk, sedangkan pada Kabupaten lainnya tidak berpengaruh secara nyata.

Penelitian Ratna Sari Dewi (2007) yang berjudul “Analisis Komponen Pertumbuhan Wilayah Dan Kesenjangan Antar Wilayah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Timur”, mempunyai tujuan untuk mengetahui pertumbuhan antar sektor Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur dan untuk mengetahui pertumbuhan sektor primer dan sektor lainnya serta kesenjangan wilayah antar Kota/Kabupaten. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: a) terdapat perbedaan pertumbuhan sektor antar Kota/Kabupaten di wilayah Propinsi Jawa Timur dilihat dari komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah; b) Tidak terdapat perbedaan pertumbuhan sektor

primer/pertanian dan sektor lainnya di wilayah propinsi Jawa Timur . Seluruh Kota/Kabupaten sewilayah Propinsi Jawa Timur pertumbuhan sektor primer/pertanian memiliki pertumbuhan sektor yang terendah pada semua Kota/Kabupaten dengan nilai kurang lebih sama yaitu -11 %. Dengan demikian sektor pertanian masih membutuhkan perhatian yang lebih besar dalam prioritas pembangunan di propinsi Jawa Timur; c) Tidak terdapat kesenjangan wilayah antar kabupaten/kota di wilayah Propinsi Jawa Timur yang terlalu fluktuatif antara kurun waktu 2000 – 2004 dan perbedaan Indeks Williamson pada tahun 2000 dan 2004 sangat kecil. Hal ini menunjukkan masing-masing Kabupaten/Kota pertumbuhan ekonomi sama-sama berjalan lamban.

2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

Kerangka Pemikiran merupakan jaringan hubungan antar variabel yang membentuk pola/alur pemikiran penelitian yang didasarkan pada rumusan permasalahan yang telah ditetapkan. Adapun kerangka pemikiran dapat dinyatakan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 2.3 Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

3.1.1. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur, dengan pertimbangan bahwa kawasan ini merupakan daerah yang cukup potensial, sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia dan masih dapat dikembangkan, di Kota Kediri sektor yang mendominasi adalah sektor industri sedang Kabupaten Kediri adalah sektor pertanian.

3.1.2. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian discriptif komparatif (*comparative description research*). Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan secara detail, kemudian membandingkan berdasarkan kriteria tertentu untuk mendapatkan prioritas dari suatu obyek penelitian

3.1.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Singarimbun, 2001: 98). Populasi

dalam penelitian ini adalah seluruh komoditas yang dihasilkan di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, hal ini kaitannya kinerja ekonomi dan kinerja spasial.

Sample adalah Subkelompok atau merupakan bagian terkecil dari suatu populasi (Husein Umar, 1998: 77). Pengambilan sampel dalam penelitian ini dengan *Purposive Random Sampling* yaitu pengambilan sample secara sengaja dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Hal ini terkait dengan Kabupaten Kediri yang meliputi 23 Kecamatan (diambil 4 Kecamatan yang merupakan hinterland dan mempengaruhi Kota). Sedangkan Kota Kediri terdiri dari 3 kecamatan diambil semua. Khususnya pengambilan data PDRB di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri, masing-masing selama 10 tahun yaitu tahun 1999 – 2008.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder.

- a) Data primer yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti dari pengamatan dan wawancara langsung kepada responden yang dianggap *expert* (Kepala Bappeda, Camat, Lurah, Kepala Desa, Perguruan Tinggi dan Tokoh Masyarakat) dalam menyikapi kebijakan pembangunan wilayah Kota Kediri dan Kabupaten Kediri.
- b) Data sekunder yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Data ini meliputi: data Product Domestic Regional Bruto, pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita dan kinerja secara spasial baik

berupa ketersediaan infrastruktur jalan hingga kepadatan penduduk selama tahun 1999 -2008.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dengan cara wawancara langsung dengan stakeholder yang ada di Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Sedang data sekunder dengan cara melalui metode dokumentasi yaitu berupa laporan, catatan dan informasi yang berkaitan dengan materi bahasan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

3.4.1 Analisis Shift Share

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat diketahui dengan cara membandingkan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dengan laju pertumbuhan ekonomi wilayah di atasnya (dalam hal ini pertumbuhan ekonomi kota Kediri dengan gabungan kota dan Kabupaten Kediri Propinsi Jawa Timur), maka untuk mengetahui pola pergeseran perkembangan ekonomi di kota Kediri Jawa Timur digunakan analisis Shift Share (Budiharsono, 1991). Secara matematis dirumuskan sebagai berikut :

$$\Delta Y_{ij} = PN_{ij} + PP_{ij} + PP_{wij}$$

Rumus matematika tersebut secara rinci dapat dijabarkan sebagai berikut :

$$Y'_{ij} - Y_{ij} = \Delta Y_{ij} = Y_{ij}(R_a - 1) + Y_{ij}(R_i - R_a) + Y_{ij}(r_i - R_i)$$

Keterangan :

Dalam wilayah terdapat m daerah atau wilayah dan n sektor ekonomi.

j = Wilayah tertentu ($=1,2,3,\dots,m$)

i = Sektor ekonomi yang terdiri dari sembilan sektor, dibagi dalam tiga sektor utama, yaitu primer, sekunder, tersier ($=1,2,3,\dots,n$)

ΔY_{ij} = Perubahan dalam produksi atau PDRB sektor i pada wilayah ke j

Y_{ij} = Produksi atau PDRB dari sektor-sektor i pada wilayah ke j pada tahun dasar analisis.

Y'_{ij} = Produksi atau PDRB dari sektor-sektor i pada wilayah ke j pada tahun akhir analisis.

$Y_i = \sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = PDRB (daerah Kota atau Kabupaten) dari sektor i pada tahun dasar analisis.

$Y'_i = \sum_{j=1}^m Y'_{ij}$ = PDRB (daerah Kota atau Kabupaten) dari sektor i pada tahun akhir analisis.

$Y_{..} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y_{ij}$ = PDRB (wilayah Kediri) dari sektor i pada tahun dasar analisis.

$Y'_{..} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m Y'_{ij}$ = PDRB (wilayah Kediri Jawa Timur) dari sektor i pada tahun akhir analisis.

(r_i-1) = Persentase perubahan PDRB di sektor i wilayah ke j

$(R_a-1) = PN_{ij}$ = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan wilayah di atasnya (wilayah Kediri Jawa Timur).

$(R_i-R_a) = PP_{ij}$ = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan proporsional.

$(r_i-R_i) = PP_{wij}$ = Persentase perubahan PDRB yang disebabkan komponen pertumbuhan pangsa wilayah.

Dari penjumlahan dua komponen pertumbuhan wilayah yaitu komponen pertumbuhan proporsional dan komponen pertumbuhan pangsa wilayah dapat digunakan untuk mengidentifikasi pertumbuhan suatu wilayah. Jumlah antara kedua komponen tersebut diatas disebut pergeseran total (PT) yang dinyatakan sebagai berikut :

$$PT_{ij} = PP_{ij} + PP_{wij}$$

Keterangan:

PT_{ij} = Pergeseran total sektor i pada wilayah j.

Adapun kriterianya:

- a. Jika $PT_{ij} > 0$, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah j termasuk dalam kelompok maju.
- b. Jika $PT_{ij} < 0$, maka pertumbuhan sektor i pada wilayah j termasuk dalam kelompok lamban.

3.4.2 Analisis Kausalitas Grenger

Untuk mengetahui ada tidaknya integrasi ekonomi antara dua wilayah yang secara konseptual merupakan wilayah satu kesatuan fungsional dipergunakan konsep kausalitas versi Granger dikenal sebagai konsep *kausalitas sejati* atau *konsep prediktibilitas*, dimana masa lalu dapat mempengaruhi masa kini atau masa datang. Akan tetapi masa kini atau masa datang tidak dapat mempengaruhi masa lalu (Gujarati, 2001: 207).

Penelitian ini dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengukur apakah variabel dependen secara kausal betul-betul ditentukan oleh variabel-variabel bebas secara sepihak, ataukah ada kemungkinan dalam suatu model persamaan tunggal, variabel bebas juga ditentukan oleh variabel dependen, sehingga dalam hal ini terdapat kausalitas dua arah (*bidirectional causality*). Sedangkan analisis kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan hasil dari pengukuran secara kuantitatif, yaitu dengan cara memberi pendapat dari setiap hasil perhitungan.

Penelitian ini menggunakan alat analisis dengan penekanan pada uji kausalitas. Uji ini sangat penting, terutama bila diketahui adanya hubungan antara dua variabel ekonomi yang satu sama lain saling mempengaruhi pada dua wilayah yang secara konseptual merupakan wilayah fungsional yang terintegrasi.

Model teoritis yang digunakan untuk menganalisis arah kausalitas antara Pertumbuhan ekonomi (EG) di kawasan pusat pertumbuhan dan masing-masing wilayah hinterlandnya, yakni pertumbuhan ekonomi Kota Kediri tahun t (EGH_t) dan pertumbuhan ekonomi wilayah hinterland wilayah Kediri tahun $t-1$ (EGT_{t-1}) adalah model kausalitas *Granger* (1969). Model ini dapat menjelaskan hubungan sebab akibat variabel yang diamati.

Granger (1969) menyatakan variabel EGT_{t-1} dikatakan menyebabkan EGH_t , apabila penyertaan nilai-nilai masa lalu EGT_{t-1} dapat menghasilkan perkiraan yang lebih baik akan EGH_t , dibandingkan jika EGT_{t-1} . Disajikan dalam konteks hubungan model kausalitas Granger dirumuskan sebagai berikut (Gujarati, 1995;620) :

$$EGT_t = \sum_{j=1}^m a_j EGH_{t-1} + \sum_{j=1}^m b_j EGT_{t-1} + u_t \quad (1a)$$

$$EGT_t = \sum_{j=1}^m c_j EGT_{t-1} + \sum_{j=1}^m d_j EGH_{t-1} + v_t \quad (1b)$$

dimana :

EGT_t = Pertumbuhan ekonomi di wilayah hinterland tahun t

EGH_{t-1} = Pertumbuhan ekonomi di wilayah pusat pertumbuhan tahun $t-1$

t = Waktu

u_t v_t = Diasumsikan tidak saling berkorelasi atau dipandang mempunyai sifat suara resik (*white noise*)

$t-j$ = Operasi kelambanan (lag/masa lalu)

Hasil regresi kedua model linier akan menghasilkan empat kemungkinan mengenai nilai koefisien-koefisien regresi masing-masing (Gujarati:1995:620)

1. Jika $\sum_{i=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$,maka terdapat kausalitas satu arah dari Y ke X.
2. Jika $\sum_{i=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$,terdapat kausalitas satu arah dari X ke Y.
3. Jika $\sum_{i=1}^n b_j = 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j = 0$,maka X ke Y bebas antara satu dengan yang lain.
4. Jika $\sum_{i=1}^n b_j \neq 0$ dan $\sum_{j=1}^s d_j \neq 0$,maka terdapat kausalitas dua arah antara Y ke X.

Untuk memperkuat indikasi keberadaan berbagai bentuk kausalitas tersebut, maka dilakukan *F-test* untuk masing-masing model regresi.

3.4.3 Analisa Gravitasi

Dalam analisa gravitasi, daerah dianggap sebagai suatu massa. Hubungan antara daerah dipersamakan dengan hubungan antara masa-masa wilayah yang mempunyai daya tarik, sehingga saling mempengaruhi antara daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik antar daerah (Tarigan, 2009:149).

Rumus gavitasi yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$T_{ij} = k \frac{P_i \cdot P_j}{d_{ij}^2}$$

Dimana :

T_{ij} = kekuatan gravitasional antara kota I dan kota j

K = konstata

P_i = jumlah penduduk di kota I

P_j = jumlah penduduk di kota j

d_{ij} = jarak fisik antara kota I dan kota j